

Buku Satu



*Militansi Santri*  
dalam Menyongsong  
**INDONESIA EMAS**



Fuji Astutik, dkk.

Pesantrenpreneur Era Society 5.0 <i>Mohamad Bastomi</i> .....	61
Transformasi Pesantren sebagai The Guardian of Law and Justice Berbasis Kemaslahatan bagi Masyarakat <i>Mustafa Lutfi</i> .....	69
Pesantren sebagai Pioner Keadilan dan Kemaslahatan Umat <i>A. Samsul Ma'arif</i> .....	79
Mencintai Kiai dalam Bingkai Keadilan <i>Abd. Rouf</i> .....	87
Peran Pesantren dalam Pembangunan Hukum Nasional <i>Abdul Kadir, Khoirul Anam</i> .....	93
Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Pesantren <i>Dwi Fidhayanti</i> .....	103
Militansi Pesantren dalam Pembentukan Santri Sadar Hukum dan Berkeadilan <i>Umar Al Faruq</i> .....	111
Peran Pesantren dalam Upaya Pembudayaan Hukum <i>Fina Riqqotul Aisyiyah</i> .....	119
Pesantren dan Multikulturalisme : Merawat Negeri, Menjaga NKRI (Trilogi Ukhuwah dalam Mengembangkan Masalah Sosial Bidang Keberagamaan dan Kebangsaan : Menelisik Tanggung Jawab Pesantren dalam Dakwah Islam Wasathiyah Berparadigma al-Qur'an <i>M. Fauzan Zenrif</i> .....	141
Implementasi Prinsip Integritas Pada Pendidikan Pesantren dalam Melahirkan Santri Berkarakter Anti Korupsi <i>Aditya Prastian Supriyadi, M.H.</i> .....	163

Peran Pesantren  
Implementasi  
*Muhamad H*

Fiqh Perad  
Nusantar  
*Zaenul M*

Peran L  
Nilai-N  
*Khoiru*

Unda  
Tuju

Akl

Tu

In

M





Buku ini merupakan wujud sebagai sumbangsih pemikiran dan harapan kepada pesantren dalam menyikapi perubahan dan dinamika masyarakat yang berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang dikenal dengan era industri 4.0 dan era society 5.0 yang mengubah setiap lini kehidupan masyarakat, mulai ekonomi, politik, teknologi, tradisi, budaya hingga cara beragama masyarakat.

Pesantren yang sejak zaman kolonial memiliki peran sentral dalam membentengi tradisi keagamaan, pusat ekonomi, pusat politik dan perjuangan, dan pusat kajian keislaman dan kebangsaan harus dipertahankan dan dikuatkan dengan melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Pesantren perlu memperkuat peran tersebut dengan melakukan inovasi dan pembaharuan dengan tanpa meninggalkan tradisi pesantren dan Islam dalam melakukan pengembangan masyarakat. Pesantren yang mengusung model pendidikan dan kajian keagamaan yang menekankan kepada moralitas, religiusitas dan keteladanan kepada para santrinya merupakan harapan bangsa dan negara untuk memecahkan berbagai persmasalahan agama, ekonomi, politik, dan sosial



**UIN MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)**  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144  
Telepon/Faksimile: (0341) 573225  
Email: uinmalikipressredaksi@uin-malang.ac.id  
<http://malikipress.uin.malang.ac.id>





**IMPLEMENTASI PRINSIP INTEGRITAS PADA  
PENDIDIKAN PESANTREN DALAM MELAHIRKAN  
SANTRI BERKARAKTER ANTI KORUPSI**  
Aditya Prastian Supriyadi, M.H.\*

**Pesantren dan Tantangan Kaderisasi Santri Anti Korupsi**

Implementasi pendidikan anti korupsi perlu diterapkan di pesantren dalam membina moral santri. Upaya tersebut merupakan kaderisasi santri dalam menanamkan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Tradisi ini harus selalu menjadi agenda utama pesantren dalam meningkatkan moralitas santri sebagai modal pembangunan SDM unggul dan berkualitas yang memiliki prinsip integritas. Ketika Pendidikan anti korupsi telah menjadi tradisi pendidikan di Pesantren, tentu dapat berimplikasi dalam memperkuat konsistensi karakter santri yang berbudaya jujur. Santri yang diajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini akan memiliki filter untuk menghindari perbuatan korupsi yang notabene juga dilarang oleh Agama Islam.

Menanamkan karakter anti korupsi kepada peserta didik sebagai budaya merupakan upaya yang tergolong tidak mudah. Namun, ini yang menjadi tantangan bagi Pesantren untuk memiliki komitmen tinggi agar implementasi Pendidikan ini bisa berjalan sukses. Dari sinilah penulis ingin memberikan suatu usulan realisasi Pendidikan anti korupsi dapat berjalan sukses jika diajarkan dengan menanamkan nilai-nilai integritas kepada santri. Sebagaimana Van Monfort menjelaskan penanaman karakter integritas akan membentuk karakter anti korupsi



bondong untuk mempromosikan prinsip integritas sebagai instrumen ampuh dalam melawan ancaman korupsi bagi reformasi di setiap penyelenggaraan pemerintahan. Penanaman nilai integritas tentu menjadi tumpuan untuk mereformasi mental dalam menghindarkan prinsip penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan mencegah tindakan ilegal bagi pejabat yang berniat memperkaya diri dengan jalan yang salah.

Lalu bagaimana Indonesia merespon urgensi pendidikan integritas bagi peserta didik?, menurut penelitian Setyosari, implementasi Pendidikan Indonesia masih mengedepankan pengetahuan praktis dan kelulusan akademik daripada nilai-nilai moral yang mengakibatkan generasi muda tidak biasa dengan integritas. Padahal kejujuran merupakan nilai esensial yang dibutuhkan sebagai modal utama membangun SDM yang berintegritas. Kondisi tersebut yang mengakibatkan prinsip integritas perlu menjadi tolak ukur evaluasi pendidikan di Indonesia dalam memperkuat moral peserta didik. Jika karakter moral tidak diperkuat, kehidupan sosial individu tidak akan memiliki haluan kehidupan yang benar sehingga pendidikan di Indonesia juga harus mengedepankan pondasi karakter bangsa yang menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan karakter di Indonesia.

Reformasi pendidikan berkarakter di Indonesia perlu partisipasi aktif dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik perlu berkreasi tinggi dalam membangun motivasi peserta didik agar bergairah untuk mempelajari integritas dengan pendekatan pembelajaran kritis imajinatif dan mempromosikan kesatuan moral. Betawi menyampaikan terdapat upaya tertentu agar nilai integritas dapat diintegrasikan melalui implementasi pendidikan dengan mengedepankan dimensi integritas moral seperti empati, kejujuran, rasa hormat yang dapat meningkatkan keberanian peserta didik pasca mengikuti program pendidikan tersebut. Dengan begitu prinsip integritas akan tumbuh pada jiwa peserta didik sebagai dasar memecahkan suatu masalah yang dihadapi tanpa terpengaruh godaan-godaan dari luar.

Implementasi pendidikan integritas perlu dilakukan dengan pendekatan *aktif learning*. Selain siswa, guru juga memiliki peran

melalui kesadaran moral yang diejawantahkan pada perilaku dan prilaku.

Untuk mewujudkan santri yang berintegritas, perlu menjadikan nilai Islam kedalam prilaku anti korupsi. Sebagaimana agama (termasuk Islam) sangat melarang keras melakukan perbuatan korupsi. Abstraksi nilai Islam dapat dikembangkan ke dalam nilai-nilai religiusitas. Hasil abstraksi tersebut dapat menjadi haluan budaya prilaku integritas yang telah sepenuhnya direalisasikan oleh umat sebagaimana beberapa tokoh Islam di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi. Keberhasilan program ini tentu menjadi sumbangsih penting dalam kaderisasi SDM untuk melanjutkan kepemimpinan penyenggaraan instansi negara di masa depan. Mengingat saat ini terjadi tren penurunan kepercayaan pada sektor lembaga publik yang sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

### **Urgensi Prinsip Integritas dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Santri**

Konsep integritas memiliki berbagai macam multiperspektif. Jika mengutip dari Kamus Oxford, Integritas berarti keutuhan, keadaan yang menyeluruh, tidak terputus. Orang yang memiliki prinsip integritas akan tercermin pada konsistensi antara pembicaraannya dan tindakan secara utuh dan menjadi karakter keagungan moral dalam menghubungkan proses diri dengan orang lain. Kemudian Huberts menyampaikan integritas dapat terwujud jika ada kesesuaian komitmen, tindakan, prinsip nilai, moral, norma, dan aturan untuk menunjukkan kejujuran, dan kejujuran menjadi dimensi integritas dan inti karakter.

Saat ini dunia Internasional merespon tentang pentingnya realisasi pendidikan integritas akibat tergerusnya moral pejabat negara yang mengabaikan nilai-nilai etika yang berujung pada tindakan korupsi. Kondisi tersebut akhirnya membuat berbagai negara seperti Singapura, Jerman, Australia, India dan Selandia Baru berfokus pada advokasi nilai-nilai pendidikan integritas. Hal tersebut yang menjadikan berbagai negara berbondong-



sosial yang tugasnya memperkenalkan nilai-nilai baru. Dalam hal ini Lembaga Pendidikan berperan menanamkan pendidikan integritas untuk membentuk watak, sikap, dan perilaku warga negara yang bermental integritas anti korupsi. Membentuk karakter anti korupsi pada santri bertujuan agar santri menjadi pribadi yang dapat menghindari egosentrisme dan mementingkan diri sendiri yang merupakan cikal bakal bibit lahirnya korupsi di masa depan mendatang.

Pada artikel ini penulis ingin memberikan usulan bagaimana implementasi Pendidikan anti korupsi kepada santri dengan pendekatan prinsip integritas anti korupsi dari Betawi yang terdiri dari pendidikan kejujuran, pendidikan empati dan pendidikan rasa hormat (*respect*). Pertama Pendidikan kejujuran. Penanaman nilai jujur sangat penting bagi peserta didik dan bekal dalam memasuki dunia kerja di bidang pelayanan publik. Hal ini berdasarkan penelitian di Banerjee mengungkapkan siswa yang tidak jujur (*menyontek*) cenderung memilih pekerjaan sektor publik yang erat dengan korupsi. Menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik sangat penting mengingat penelitian dari Hana dan Wang telah mengklaim bahwa siswa yang sering mencontek adalah calon koruptor di masa depan. Apabila melihat negara yang paling sedikit korupsinya seperti Denmark, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kejujuran siswa dengan korupsi.

Urgensi pendidikan anti korupsi dapat membentuk karakter pribadi santri yang jujur dan berintegritas saat berada di masyarakat. Untuk mewujudkan harapan di atas perlu penguatan nilai kejujuran yang dapat diajarkan melalui pembelajaran mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dengan kolaborasi nilai Islam. Optimalisasi penguatan mata pelajaran tersebut dapat membina warga negara yang bertanggung-jawab, efektif dan terdidik.

Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas meliputi proses penyiapan generasi muda untuk mengemban peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk dalam persekolahan,



sentral terutama merancang berbagai cara untuk mengembangkan integritas dalam kurikulum pembelajaran. Penerapan pendidikan integritas kepada peserta didik dianggap tepat jika dilakukan di ranah pesantren karena lembaga ini memiliki prinsip sosial, emosional, kognitif, psikomotorik, nilai moral, nilai spiritual, dan humanisme individu. Selain itu menurut Fakhruddin dan Sulisworo, nilai-nilai agama dalam pendidikan pesantren dapat dipadukan kedalam prinsip integritas sebagai landasan pembelajaran dalam menanamkan prinsip kemanusiaan pada santri. Penelitian Badruzzaman menjelaskan integritas pada islam karena dipengaruhi oleh dimensi lingkungan pesantren yang bernuansa keagamaan. Optimalisasi integrasi islam dan integritas pada pendidikan di pesantren akan sangat mudah dalam melahirkan generasi yang jujur, toleransi, taat kepada Tuhan dan nasionalisme.

Selanjutnya Baharom menyampaikan terdapat urgensi lain mengapa Pendidikan integritas perlu direalisasikan kepada peserta didik. Upaya tersebut dianggap penting untuk dilakukan karena dapat memupuk kinerja tinggi santri sebagai implementasi pendidikan Islam melalui spiritual, intelektual, sosial dan material dalam mempersiapkan kaderasi anti korupsi. Mengingat saat ini korupsi perlu ditangani secara serius karena korupsi dapat merugikan kemakmuran negara, merusak tata pemerintahan yang baik, mendistorsi kebijakan publik, misalokasi sumber daya dan merusak pertumbuhan ekonomi.

### **Implementasi Prinsip Integritas pada Pendidikan Anti Korupsi bagi Santri**

Implementasi Pendidikan anti korupsi kepada santri merupakan bentuk partisipasi dunia Pendidikan dalam ikut mencegah korupsi sejak dini, disamping upaya penegakan hukum represif yang menjadi kompetensi aparat penegak hukum. Keterlibatan Pendidikan formal dalam mencegah korupsi bukanlah hal baru. Hal ini karena lembaga Pendidikan memiliki posisi yang strategis sebagai media pencetak generasi perubahan



tersebut Santri dapat menghormati jabatannya untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kerabat dan teman dekat dalam menghadapi godaan korupsi dari eksternal yang dapat merusak citra pekerjaannya.

Selain Pendidikan, agar penanaman prinsip integritas anti korupsi kepada santri dapat berhasil, perlu pembiasaan diri dengan agenda-agenda tertentu sebagai bentuk latihan pembentukan karakter anti korupsi. Menurut penelitian S. Purnama & D. Sundawa, kebiasaan anti korupsi dapat dibangun oleh siswa sejak dini melalui jalur Pendidikan diantaranya melalui jalur *intra curricular*, *co urricular* & *ekstra curricular*. Model ini dapat diterapkan dalam dunia Pendidikan pesantren yang dapat digunakan dalam membina santri memiliki budaya yang dapat Pertama, dari sisi *intra curricular*, anti korupsi dapat disisipkan pada pelaksanaan setiap mata pelajaran. Misalnya pengecekan kesiapan siswa, kerapian, dan kelengkapan seragam siswa serta kebersihan kelas. Jika ada siswa yang melanggar salah satu poin-poin tersebut perlu ada teguran dari pengajar dengan meminta penjelasan secara jujur. Guru juga dapat memberikan contoh dengan cara sebelum pelajaran di mulai, guru bersama santri bisa bersama-sama memungut sampah yang berserakan di sekitar kelas.

Kedua *Co-curricular*. Pendidikan anti korupsi dapat disisipkan dalam kegiatan *co-curricular* baik di dalam maupaun di luar kelas. Misalnya penyisipan anti korupsi pada kegiatan santri diluar kelas dengan menerapkan model kantin integritas. Model kantin mendepankan prinsip kejujuran. Setiap santri yang mengunjungi kantin integritas melakukan transaksi sendiri, menyimpan dan mengambil uang sendiri. Proses kegiatan tersebutlah yang dapat menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik untuk selalu diterapkan setiap saat. Beberapa model lain dapat diterapkan dalam menunjang kegiatan *co-curricular* lain bagi santri tergantung inovasi dari setiap pengajar.

Ketiga *extracurricular*. Penerapan anti korupsi juga perlu disisipkan pada agenda *extracurricular* seperti agenda Paskibraka, Pramuka, PMR, Sport Club, dan agenda-agenda lain santri yang tersedia di Pesantren. Semua Santri yang tergabung dalam

ekstrakurikuler wajib mengungkapkan alasan sebenarnya jika tidak dapat hadir, kejujuran dalam mengisi daftar hadir sebagai salah satu bentuk pendukung dan penerapan Pendidikan Anti-Korupsi untuk mewujudkan karakter integritas santri di pesantren. Anggota ekstrakurikuler harus hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditentukan sebagai cerminan dengan menghindari korupsi waktu. Selain itu, organisasi pengelola dana kas harus transparan dan semua anggota berhak untuk mengawasi pengelolaan dana tersebut.

## REFERENSI

- AL-FATIH, Sholahuddin. 2018. *Darus as an Anti-Corruption Education*. Asia Pacific Fraud Journal, 3.1
- B. R. Hanna and S. Wang, 2020. "Dishonesty and Selection into Public Service: Evidence from India," Am. Econ. Assoc., vol. 9, no. 3.
- Badruzzaman, B. 2019. *Integritas Siswa Sekolah Menengah Atas di Kawasan Timur Indonesia, (Pengaruh Tingkat Kondusifitas Lingkungan Terhadap Integritas Siswa)*. Al-Qalam, 25(1)
- Baharom, M., Halimatus Saadiah, M. S., & Sharifah Hayaati. Syed Ismail. 2014. *The role of integrity as a mediator between work satisfaction and work performance in the perspective of Islam: An empirical approach using Sem/Amos Model*. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences, 2(1)
- Basabose, Jean De Dieu. 2019. *Anti-Corruption Education: Ubupfura Model*. In: *Anti-Corruption Education and Peacebuilding*. Springer, Cham.
- Betawi, A. 2018. *Calling for character education: promoting moral integrity in early childhood education in Jordan*. Early Child Development and Care
- Branson, M. S. 1998. *The Role of Civic Education*: Center for Civic Education.



pengajaran, dan pembelajaran dalam proses penyiapan warga negara.

Kedua Pendidikan Empati. Penerapan pendidikan anti korupsi kepada santri merupakan upaya yang sangat penting dalam membentuk pengendalian diri secara emosional sebagai basis pola berfikir. Menurut penelitian S. Al-Fatih, Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan pada pengembangan kurikulum empati di Indonesia disamping kurikulum lain seperti kurikulum kepemimpinan, kurikulum kejujuran, kurikulum integritas, dan kurikulum lokal. Realisasi pendidikan anti korupsi dengan pendekatan empati dapat dikolaborasikan dengan kurikulum lain melalui penayangan video interaktif beserta forum diskusi. Realisasi tersebut diharapkan dapat digunakan santri yang beranjak pada tingkat Pendidikan sekolah untuk menemukan jati dirinya.

Urgensi implementasi pendidikan anti korupsi berbasis empati kepada santri sangat berimplikasi dalam menanamkan rasa tanggung-jawab tinggi dan bekerja keras. Dengan prinsip empati yang dimiliki oleh santri menjadi dasar pola pikir dalam mengukur nilai-nilai positif tidak hanya berdasarkan pikiran namun juga menggunakan perasaan. Untuk membangkitkan pikiran anti korupsi peserta didik, R. Chowdury memaparkan jiwa peserta didik harus dilatih untuk membangun jiwa pengorbanan peserta karena sikap itu yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi diantara para pemimpin. Artinya Santri perlu dilatih dan dididik mengenai prinsip rela berkorban untuk kebaikan karena dengan begitu akan memunculkan jiwa empati bagi Santri dalam mengawal pembelajaran anti korupsi.

Ketiga pendidikan rasa hormat (*respect*). Dari perspektif ini, santri perlu diajarkan bagaimana bertindak dengan rasa hormat. Rasa hormat yang tertanam pada peserta didik menjadi basis pembentukan karakter anti korupsi melalui ketataan pada keberlakuan hukum yang adil, salah satunya peserta didik dapat memahami keberlakuan UU Korupsi pada suatu negara secara praktis. Penanaman rasa hormat kepada santri sangat baik bagi bekal di masa depan jika Santri menempati pekerjaan dengan posisi pelayanan publik yang strategis. Karena dengan bekal

- Geddes, B., & Neto, A. R. 1999. *Institutional sources of corruption in Brazil*. In K. S. Rosenn & R. Downes (Eds.), *Corruption and political reform in Brazil: The impact of Collar's impeachment*. Coral Gables: North-South Centre.
- Hakim, L. 2012. *Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan islam*. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2)
- Hardaker, G., & Sabki, A. A. 2015. *Islamic pedagogy and embodiment: an anthropological study of a British Madrasah*. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 28(8)
- Hetherington MJ and Rudolph TJ. 2008. *Priming, performance, and the dynamics of political trust*. *Journal of Politics* 70(2)
- Hornby. 2010. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, International Student's Edition (Eight)*. Oxford University Press.
- Horowitz, M. (2001). *Defining Character Integrity*. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 50(2)
- Huberts, L. W. J. C. 2018. *Integrity: What it is and Why it is Important*. *Public Integrity*, 20(1)
- I. Valdovinos-Hernandez, M. Szymanski, and K. Grabowska. 2019. "Mea Culpa—The Role of Religion in Corruption Perception," *Forum Sci. Oeconomia*, vol. 7, no. 3.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an international Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Musschenga, A. W. 2002. *Integrity - Personal, Moral, and Professional*. Springer, Dordrecht.
- Nilsen, R. 2004. *The Concept of Integrity in Teaching and Learning*. Symposium on Promoting Academic Integrity, 2.
- Penkauskiene©. 2006. *Anti-Corruption Education at School: Methodical material for general and higher education schools*. Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania



- Purnama, Shilmy; Sundawa, Dadang. 2017. *The Development of Anti-Corruption Education Model to Support Students Integrity Character in Schools Through Civic Education*. Indonesia: University of Education; The International Academic Forum.
- R. Banerjee, T. Baul, and T. Rosenblat. 2015. "On Self Selection of The Corrupt into The Public Sector," *Econ. Lett.*, vol. 127, pp. 43-46.
- Rahman, Kaunain. 2019. *Overview of Corruption and Anti-Corruption in Bangladesh*. Transparency International.
- Rose-Ackerman, S. 1999. *Corruption and government: Causes, consequences and reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosyada, D. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta.
- S. Barfort, N. Harmon, F. Hjorth, and A. Olsen. 2015. "Dishonesty and Selection into Public Service in Denmark: Who Runs the World's Least Corrupt Public Sector?" *Discussion Papers*, University of Copenhagen, Department of Economics.
- Sari, Vina Kurnia; Akhwani, Akhwani. 2021. *Implementation of Character Education Based on Anti-Corruption Values Through Extracurricular and Habituation in Elementary School*. In: *International Conference on Elementary Education*.
- Schuyler, K. G. 2010. *Increasing Leadership Integrity Through Mind Training and Embodied Learning*. *Consulting Psychology Journal*, 62(1)
- Setyosari, Punaji. 2021. *Exploration of Moral Integrity Education and Superior Cadre Leadership at Madrasah Boarding School Indonesia*. *International Journal of Instruction*, 2021, 14.4
- Shobahiya, Mahasri; Budiyanto, Sapta Mei. 2022. *Assessing the Honesty Integrity of The Educator Candidates*. In: *International*